



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22 /VI.07/HK/2022**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/7052/SJ tanggal 13 Desember 2021 hal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2021 dan Penyampaian Draft Rencana Aksi Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pencegahan Konflik Sosial;
 - b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
 - c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 3 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 226/VI.07/HK/2022
 TANGGAL : 22-07-2022

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		CAPAIAN (%)	KETERANGAN
				B04, B08, B12	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENANGGANAN KONFLIK FAKTUAL DI DAERAH							
Mediasi & Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik berlatar belakang lahan/sda, sara, politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/industrial	Dishut Polda, Dismaker	Disbun, Dismaker, Dinsos, Kanwil BPN, Kanwil Agama	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Faktual berlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial di Provinsi Lampung I di Kab/Kota	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Faktual berlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial di Provinsi Lampung	Target B08: Penyelesaian kasus konflik faktual berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Januari – Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali	Target B12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September – Desember 2022 sebanyak 1 (satu) kali	

1	2	3	4	5	6	7	8
B. PENANGGANAN KONFLIK BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3AKS)							
Fasilitasi Penanganan konflik dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) (RA: 02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bakesbangpol	Biro Hukum, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polda,	Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali	TARGET: Tersampaikannya sosialisasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Target B08: Terlaksananya kegiatan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali	Target B12: Terlaksananya kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali	
C. RAPAT KOORDINASI TIM TERPADU PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL							
Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 03)	Kesbangpol	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Target: Terlaksananya Rakor Tim Terpadu PKS Tingkat Provinsi, Kab/Kota sebanyak 1 kali	Target B08: Terlaksananya Rakor Tim Terpadu PKS Tingkat Provinsi, Kab/Kota sebanyak 1 kali	Target B12: Terlaksananya Rakor Tim Terpadu PKS Tingkat Provinsi, Kab/Kota sebanyak 1 kali	

1	2	3	4	5	6	7	8
D. PENYUSUNAN PETA POTENSI KONFLIK DI DAERAH							
Pelaporan dan Pemetaan Kerawanan/Pot ensi Konflik di Daerah (RA : 04)	Polda, Kesbangpol	Dinas Kehutanan, , Dinas Sosial, Satpol PP, Kawil Kemenag, BIN	Tersusunnya data dan peta kerawanan/ potensi konflik di daerah	TARGET: Tersedianya data dan peta kerawanan/potensi konflik di daerah	Target B08: Terlaksananya pelaporan peristiwa konflik dan pemetaan potensi konflik di daerah yang terjadi bulan Januari - Agustus 2022	Target B12: Terlaksananya pelaporan peristiwa konflik dan pemetaan potensi konflik di daerah yang terjadi bulan bulan September - Desember 2022	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI